

رسالة

PORNOGRAFI



**HUKUM
MENIKAHI
SAUDARA TIRI**



**A. DAEROBBY:
ILMU
DAN HIKMAH**

**SIDDIQ AMIEN:
PALESTINA**





Budaya Pop dan Kontrol Sosial : Malaysia dan Indonesia

M. TAUFIQ RAHMAN

Budaya pop memang bisa hinggap di mana-mana. Tetapi, yang namanya budaya pop, ya tergantung ramainya mode. Di Indonesia ramai mode-mode yang sensual, dan malah menjadi bintang dalam setiap berita. Fenomena "Inul" (Daratista), misalnya, menunjukkan hal tersebut.

Tetapi, di Malaysia, semua warganya boleh ditanya, siapa idola mereka (?) Dengan mantap mereka akan menjawab, "Siti" (Nurhaliza) tetap nomor satu. Apa yang dapat menjelaskan kedua fenomena tersebut? Kita coba simak telaahan perbandingan berikut.

Dengan teoretis seorang kawan berkata: "Masyarakat kita sudah dihindangi budaya Freudian". Buktinya, katanya lagi, "*Bawah sadarnya ingin yang ngeres-ngeres, eee... ngomongnya pura-pura atas nama demokrasi, HAM, kreatifitas, dll.*"

Kawan yang satu ini tentu saja seorang Muslim yang merasa *ngeri* melihat perkembangan budaya pop yang sudah sangat tanpa batas. Ia juga menunjukkan seorang sosok yang memahami teori-teori psikologi, terutama teori psiko-analisa yang menyatakan bahwa motivasi kehidupan manusia di dunia ini digerakkan oleh libido, terutama nafsu seksualitas.

Dalam teori psiko-analisa digambarkan bahwa manusia mempunyai tiga kutub kesadaran, yaitu *Id* (dorongan kebinatangan),

Ego (dorongan alamiah), dan *Superego* (dorongan spiritual). Dalam prakteknya *Ego* merupakan tempat berperangnya *Id* dan *Superego*. Siapa yang menang, itulah yang dituruti oleh sang *Ego*. Inilah yang terjadi pada individu-individu manusia.

Masyarakat, sebagai kumpulan dari individu-individu, akhirnya dapat menunjukkan apa yang terjadi pada individu-individu, dengan cara melihat pada budaya populer apa yang sedang terjadi.

Inul-nya Indonesia

Dalam masalah figur idola pada pengantar di atas, jelaslah bahwa masyarakat Indonesia sedang dihindangi virus *Id* yang menjalar tanpa arah dan tanpa kendali. Banyak orang yang secara terang-terang menyatakan suka pada Inul. Ada pula yang sembunyi di balik adagium "kreatifitas jangan dipasung". Ada pula yang menyatakan itu Hak Asasi Manusia.

Ada juga yang menyatakan, "Inul itu kecil, yang penting masalah korupsi" (artinya: kesalahan kecil dapat dimaafkan jika kesalahan lain yang nampaknya besar, hilang). Semua itu menunjukkan bahwa masalah Inul ini sudah dibela mati-matian dengan berbagai argumen, agar tetap jaya.

Demikian itu, karena Inul telah me-*manifeskan* yang *loten* (mewujudkan impian), demikian Sigmund Freud, sang pendiri psiko-analisa. Inul



telah menjadi pahlawan mereka yang *Ego*-nya dikuasai oleh *Id*. Dan virus itu sedang mewabah, gentayangan di kepala kita, di pikiran kita, dan pada ketidakpedulian kita. Inul berada di atas angin, sejalan dengan media yang lebih mengutamakan fungsi sebagai lembaga informasi dan bisnis, tanpa mempedulikan fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi pendidikan dan penjaga moralitas.

Dalam kejayaan *Id* itulah suara-suara yang mengusung moralitas dianggap tidak populer. Suara-suara peringatan dianggap seperti angin lalu, bahkan dilecehkan, dicurigai sebagai persaingan bisnis, dan sebagainya. Suara seperti H. Rhoma Irama yang mencekal Inul untuk lagu-lagunya, seolah suara sendirian (*solitude*).

Dalam bahasa Islam, suara seperti itu adalah suara para *ghuraba* (orang-orang asing). Suara Rhoma adalah suara asing di tengah hiruk pikuk gemerlap duniawi dengan gemerincing lonceng kaum intelektual yang mengamini gerak langkah erotis Inul Daratista, Anisa Bahar, dkk.

Himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak ada artinya, bahkan ada yang menyebut, "malah MUI sendiri yang bobrok" (demikian diungkapkan Mohammad Sobary beberapa waktu lalu dalam sebuah acara di SCTV).

Emha Ainun Nadjib, bahkan memuji-muji Inul sebagai *avant-garde* dangdut dan mencemooh seruan H. Rhoma. Namun, dengan kukuh, Rhoma tetap menyatakan bahwa "Tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang memperbolehkan erotisme di muka umum" (pernyataan terhadap wartawan di TV, 14/5/03).

Oleh karenanya, Rhoma tetap menyatakan larangan terhadap Inul dkk. untuk menyanyikan lagunya, karena akan dikotori oleh goyangan erotis mereka. Sejak larangan itulah, serangan begitu bertubi-tubi terhadap H. Rhoma, dengan berbagai alasan, seobyektif mungkin, bahkan sesubjektif mungkin, sampai misalnya dengan suara-suara "akan mengerahkan massa", dsb. Di sebuah negeri

demokrasi, Rhoma seperti tak punya hak bersuara, bahkan terhadap lagu ciptaannya sendiri.

Inilah sebuah cerita, dari negeri yang berdasarkan pada "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Sejuahmanakah nilai-nilai keadaban dari negeri yang sedang membangun demokrasinya ini. Sekali Inul dibiarkan, begitulah seterusnya mungkin Indonesia. Walhasil, dengan tesis Freud tadi, Indonesia telah menjadi tempat menyebarnya virus *Id*.

Siti-nya Malaysia

Lain lagi ceritanya dengan Siti Nurhaliza di Malaysia. Karena Siti bersikap santunlah maka ia dianggap figur artis nomor satu Malaysia. Di Malaysia, sekali artis tampil agak seronok, sejak itu artis tersebut kurang dihargai oleh masyarakat. Memang, hanya Siti lah yang masih bertahan dengan pakaian-pakaian yang sopan dibandingkan dengan Ella, Erra Fazira, dsb. (walaupun jika dibanding Inul, memang tidak ada apa-apanya). Tidak heran jika Siti tetap bertahan di tangga teratas artis Malaysia. Lalu, bagaimana tesis Freud tadi melihatnya?

Dengan kasus Siti ini, sudah dapat dibuktikan bahwa yang menguasai pikiran orang banyak di Malaysia adalah *Superego* (moralitas, spiritualitas, agama, dsb.), hal-hal adiluhung yang mengontrol manusia. Di negeri jiran ini, agama dihormati, siapapun yang membicarakannya. Agama dijadikan ukuran pergaulan sosial. Agama telah menjadi jiwa masyarakat.

Maka, ketika berita Inul sampai di Malaysia, disertai pula dengan berita pembelaan Gus Dur, untuk kesekian kalinya Indonesia kembali dipermalukan. Dapat dirasakan, jika sudah begini, biasanya Dr. Mahathir kembali akan mendengungkan, "Siapa yang mahu demokrasi?" kepada rakyatnya.

Walhasil, walaupun budaya pop itu selalu cenderung untuk merusak moral masyarakat,



KAJIAN UTAMA

Malaysia masih mempunyai martabat sebagai bangsa yang menjunjung tinggi moralitas. Terbukti bahwa idola masyarakatnya adalah Siti Nurhaliza, yang mempunyai sopan santun.

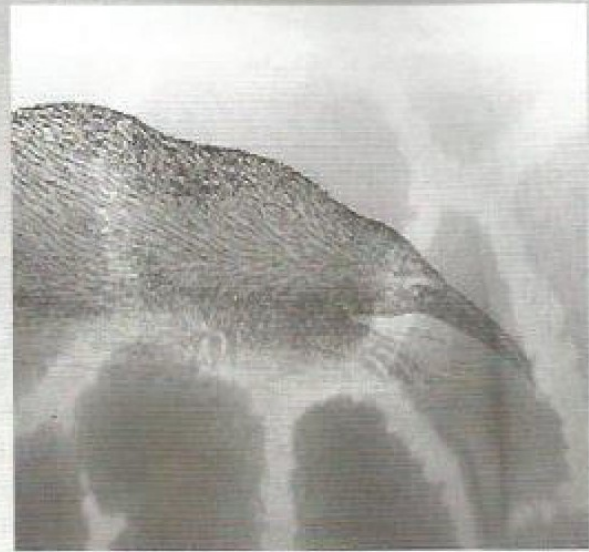
Kontrol Sosial

Apa yang bisa menjelaskan respons masyarakat di kedua negara tersebut adalah teori kontrol sosial (*social control*).

Kontrol sosial ialah cara yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku anggotanya supaya mereka mematuhi norma-norma, tradisi dan pola-pola tingkahlaku yang penting bagi meluruskan perjalanan masyarakat atau kelompok itu. Kontrol sosial bisa bercorak positif atau negatif dan kedua bentuk ini juga bisa bersifat *formal* dan *informal*. Kontrol sosial yang positif berdasarkan kepada motivasi positif seorang individu untuk mematuhiinya. Ini bisa dilakukan dengan cara memberi penghargaan, ganjaran dan hal-hal lain seperti "persetujuan sosial" (*social approval*).

Bentuk kontrol sosial yang utama bergantung kepada internalisasi individu mengenai norma sosial, nilai dan peran yang diharapkan (*role expectations*) melalui proses sosialisasi. Akibat dari proses ini, individu didorong untuk mematuhi norma-norma sosial yang dipercayainya. Sebaliknya kontrol sosial yang negatif terdapat dalam bentuk hukuman atau ketakutan terhadap hukuman seperti penjara, denda, hukuman mati dan sebagainya (*A Dictionary of the Social Sciences*, 1964: 1015). Kedua bentuk kontrol sosial inilah yang ada di Malaysia, sehingga tatanan sosial itu terbentuk dan ditaati bersama.

Kontrol sosial *formal* melibatkan sistem tatacara dan sistem otoritas seperti undang-undang, peraturan dan berbagai badan untuk melaksanakannya. Sistem-sistem tatacara dan kewibawaan itu menentukan penghargaan dan ganjaran atau hukuman yang diberikan dalam



keadaan tertentu. Kontrol sosial *informal* biasanya diwujudkan dalam bentuk pendapat umum (opini publik) dan dilaksanakan baik melalui pujian atau teguran.

Walaupun tidak terdapat suatu garis pemisah yang jelas, kontrol *formal* biasanya didapati di kalangan masyarakat kompleks yang pembagian tugasnya lebih meluas, sementara kontrol *informal* lebih kerap terdapat dalam masyarakat sederhana. (Bottomore, 1962: 71). Dengan kasus Inul, di Indonesia sudah tak nampak lagi kontrol-kontrol sosial itu, baik *formal* maupun *informal*.

Semuanya seperti tak berdaya menghadapi arus kencang *goyangisasi*, dengan adagium, "Tidak ikut, berarti munafik!". Sebegitu bebasnya istilah-istilah itu digunakan, sehingga yang mau melakukan kontrol sosial pun disebut munafik. Hal ini dapat menandakan bahwa situasi masyarakat Indonesia memang sudah tak terkendali.

Maka, di sinilah kontrol sosial perlu diungkap kembali. Karena, masyarakat yang berkeadaban perlu mengontrol sifat-sifat manusia yang cenderung kepada sifat kebina-tangan. Untuk mewujudkan dan mengekalkan peraturan sosial dalam masyarakat, kecenderungan manusia mengejar kepentingan



dirinya sehingga terjadinya "perang satu sama lain" mesti dibatasi melalui pembelajaran atau pemilihan (*social choice*), atau kedua-duanya sekaligus. Jadi kemunculan konsep kontrol sosial agak bertentangan dengan konsep *utilitarianisme* yang menekankan keadaan harmoni alamiah meskipun manusia mengejar kepentingan yang berlainan.

Salah seorang tokoh sosiologi yang membicarakan ide mengenai kontrol sosial ialah Durkheim. Durkheim menganggap kesadaran kolektif (*conscience collective*) sebagai suatu daya tekan yang mengontrol anggota masyarakat supaya mereka berperilaku mengikuti cara-cara tertentu tanpa mementingkan diri sendiri.

Menurut Durkheim, fungsi utama institusi sosial seperti keluarga, perkawinan dan agama ialah untuk menambahkan daya tekan *conscience collective*. Pada dasarnya institusi-institusi ini merupakan agen kontrol sosial. Tanpa kontrol sosial, manusia akan melakukan keganasan dan berbagai tindakan yang mementingkan diri sendiri, seperti yang dibuktikan oleh perbuatan bunuh diri yang bercorak egoistik dan anomi (Durkheim, 1970: 84).

Oleh karena itu, sebagai suatu kontrol sosial untuk mengatasi keadaan anomi, Durkheim mencanangkan pembentukan institusi profesional supaya interaksi yang terjadi bukan hanya dapat mewujudkan tatatertib tentang perilaku, tetapi juga dapat mengontrol individu yang terlibat.

Protokol Kesembilan

Selain masalah kontrol sosial, masalah Inul ini juga merupakan masalah budaya pop (*pop culture*) yang cenderung merusak. Dan, betapapun Malaysia masih menampakkan bahwa budaya pop-nya tidak begitu membahayakan moralitas bangsa, namun kewaspadaan akan perusakan akhlak melalui budaya

pop perlu terus dijaga. Masalahnya, budaya pop inilah juga yang sejak lama diagendakan orang-orang Yahudi untuk merusak orang-orang Gentile (orang-orang kafir menurut versi mereka). Berikut adalah kutipan dari Protokol Kesembilan yang dikutip oleh Henry Ford dalam bukunya *The International Jew* (1952 (1997): 111):

"Supaya tidak menghancurkan institusi-institusi Gentile secara prematur, kita harus meletakkan tangan kita secara efektif di atas mereka, dan membatat apa saja yang tumbuh dari mekanisme mereka. Pada awalnya mereka berada dalam tatanan yang ketat dan benar, tetapi kita menggantinya dengan administrasi yang kacau, liberal dan acak. Kita rusak dengan hukum, kontrak, media, kebebasan pribadi, dan, yang lebih penting lagi, dengan pendidikan dan budaya, sebagai basis keberadaan kebebasan."

"Kita sesatkan, liarkan dan amoralikan generasi muda kaum Gentile melalui pendidikan dalam prinsip-prinsip dan teori-teori yang jelas-jelas salah bagi kita, tetapi bisa kita jadikan inspirasi."

"Di atas hukum-hukum yang ada, tanpa perubahan yang aktual tetapi dengan mendistorsikannya melalui tafsiran-tafsiran yang kontradiktif, kita ciptakan suatu hasil yang fantastis."

Begitulah cita-cita kaum Yahudi Internasional. Jika terdapat kecocokan dengan apa yang terjadi di Indonesia, mungkin tidak ada hubungannya, karena secara formal tidak ada yang mengaku Yahudi di sini. Namun, sebagai suatu bentuk kaidah gerakan atau protokol, nampaknya budaya pop memang selalu ada yang mendalangi. Tentu saja, upaya penghancuran (*destruction*) lebih mudah daripada pembangunan (*construction*), apalagi terhadap manusia yang sejak semula ditakdirkan untuk bebas. □

Penulis adalah mahasiswa S-3 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.